



Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 17 Agustus 2021

Halaman: 2

PCR Turun, Keuangan Daerah Jangan Dibebeani

Perlu Aturan dan Mekanisme yang Jelas

JOGJA, Radar Jogja - Pemerintah Kota Jogja menyambut baik adanya wacana penurunan harga tes PCR kisaran Rp 450-Rp 550 ribu. Namun, Pemkot meminta adanya mekanisme dan aturan yang jelas dan tidak membebani keuangan pemerintah daerah.

Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti (HS) mengatakan konsekuensi dari wacana penurunan harga PCR untuk diagnosis Covid-19 tersebut adalah menjadi keputusan bersama baik pusat, provinsi, kabupaten dan kota. "Saya rasa itu terobosan yang bagus juga dan itu disikapi. Tapi harapan saya itu tidak menjadi beban," katanya kemarin (16/8).

HS menjelaskan sampai sekarang belum mengetahui secara pasti terkait mekanisme kebijakan tersebut. Sebab belum menerima informasi secara resminya. Apa karena banderol yang ditetapkan selama ini terlampau mahal atau akan ada skema subsidi untuk penyelenggaraan tes usap itu. Pun jika aturan itu telah direvisi, diharapkan penurunan itu tidak membawa beban konsekuensi kepada jajaran pemerintah di daerah untuk mensubsidi penyelenggara tes PCR atau antigen.

"*Sakit didukke* (diturunkan) harus ada mekanisme. Nah mau jadi beban siapa nanti? Misal di Jogja mau turun, oke turun, tetapi apakah subsidinya dibebankan ke kami (pemkot)," ujarnya.

Menurutnya, bila penurunan tersebut berasal dari margin yang masih cukup untuk turun, Pemkot Jogja pun tidak keberatan. "Ini harus ada kejelasan, saya rasa. Tapi yang penting jangan menjadi beban kami harus jelas kepada siapa," ujarnya.

Pun disadari bahwa wacana penurunan harga PCR menjadi syarat perjalanan antardaerah. Pun sangat berpotensi terhadap meningkatnya pendatang atau wisatawan dari luar kota. Terlebih, harganya sudah diturunkan. "Kami tidak khawatir yang penting warga kami sudah banyak divaksin. Kan risikonya atau akibat dari terinfeksi Covid-19 tidak terlalu berat," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DII, Pembangun Setyaningastuti menyatakan pihaknya sampai saat ini masih belum menerima SE terbaru dari Kemenkes soal revisi harga tes PCR. "Kami masih menunggu surat resmi dari Kemenkes *njiki*," begitu kata Pembangun ketika dihubungi *Radar Jogja*.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meminta Kementerian Kesehatan untuk menurunkan harga Polymerase Chain Reaction atau PCR untuk Covid-19. Hal itu disampaikan Jokowi dalam siaran yang ditayangkan *Youtube* Sekretariat Presiden, Minggu (15/8) lalu.

Ia meminta harga PCR maksimal Rp 550.000. Jokowi juga mengaku ia sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin soal itu. "Saya berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini, saya minta agar biaya tes PCR berada di kisaran Rp 450.000-Rp 550.000," kata Jokowi.

Dengan kisaran harga itu, Jokowi juga meminta hasil tes PCR bisa keluar selambat-lambatnya dalam 1x24 jam. Hal ini, kata Jokowi, berkaitan dengan percepatan penanganan Covid-19, dengan memperkuat kapasitas tes. (*wia/kur/bah/rj*)

Instansi

1.
2.
3.
4.
5.

Ig. Trihastono, S.Sos, MM

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos, MM
NIP. 19690723 199603 1 005